PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PRIVATISASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA BUMN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2013)

Oleh:
Widya Orin
Pembimbing : Zirman dan Alfiati Silfi

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : widyaorin50@gmail.com

Effect Of Self Assessment System, Level Of Education And Services On The Level Of Compliance Tax Authorities Taxpayers Umkm In Pekanbaru

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of independent directors, independent directors, audit committee and privatization of financial performance (a study on SOEs listed on the Stock Exchange Year 2009 to 2013). Total population in this study which amounted to 10 companies. While the sample in this study using total sampling that the overall population sampled as many as 10 companies. Data used in this research is quantitative data in the form of secondary data collection techniques in the documentation of existing data. This study tested using multiple regression analysis with the help of statistical data processed with SPSS version 21. Classic assumption test which used the heteroscedasticity test, autocorrelation test and multicollinearity. Test hypotheses used the statistical t-test and test the coefficient of determination. These results indicate that the independent commissioner significantly affect financial performance with thitung 5,085> 2,021, independent directors significantly affect financial performance with thitung 3,099> 2,021, the audit committee did not significantly affect the financial performance of the thitung 1,292 <2,021 and privatization significantly affect financial performance with thitung 4,850> 2,021. Adjusted R Square shows the value of 0,571. It shows that 57,1% of financial performance is influenced by variables - determinant variables in the model, while 42,9% is explained by other variables not included in the model.

Keywords : *independent directors, independent directors, audit committee, privatization and financial performance*

PENDAHULUAN

Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Pada perusahaan skala kecil, yang berwenang membuat keputusan dan bertindak sebagai manajernya adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi belum begitu banyak dan manajer

masih dapat mengingat-ingat apa yang terjadi dalam perusahaannya. Dengan berkembangnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar, maka aktivitas yang dilakukan pun akan semakin kompleks sehingga pengambilan keputusan yang penting bagi perusahaan akan lebih sulit lagi jika dilakukan oleh seseorang individu saja karena begitu area keputusan yang harus diambil dan tidak semua orang memiliki keahlian dalam berbagai bidang organisasi yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, keputusan tidak lagi dilakukan oleh direktur utama, melainkan didelegasikan kepada masing-masing manajer dengan pemberian wewenang akan divisi yang dibawahinya. Selain itu, perkembangan perusahaan menjadi perusahaan berskala besar, pastinya akan menimbulkan pemisah antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan.

Menurut Febriyani dan Zulfadin (2003), kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat diwujudkan berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang tercermin pada anggaran. Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja perusahaan. Agar berguna dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan perlu dianalisa dan diinterprestasikan. Analisa laporan keuangan (financial statement analysis) pada dasarnya menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan atau menjelaskan arah perubahan (trend). Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba-rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba-rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan.

Pengungkapan (disclosure) laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Disclosure sebagai salah satu elemen dari penerapan corporate governance, dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan salah satu kunci yang mendasari keputusan investasi oleh investor. Pengungkapan secara terperinci dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pada kondisi ketidak pastian pasar, nilai dari informasi reliabel dan relevan yang tercermin pada disclosure perusahaan menjadi faktor penting.

Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu (Helfert 2008). Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Kinerja keuangan dapat berpengaruh terhadap dewan komisaris karena dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang reliable. Oleh sebab itu, keberadaan dewan ini, akan mempunyai pengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer.

Selanjutnya komisaris independen dan dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Aji, 2012). Penelitian empiris yang dilakukan oleh Yermarck (1996) memperoleh hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga secara umum tidak berpengaruh juga terhadap integritas laporan keuangan.

Menurut Astria (2011) struktur organisasi perusahaan adalah konsep yang dibuat guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi berkala terhadap kinerja perusahaan dan menjamin akuntabilitas kerja manajemen. Struktur organisasi perusahaan diharuskan memiliki komite audit yang dapat membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Penelitian Turley dan Zaman (2004) menunjukkan adanya pengaruh antara eksistensi komite audit terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja manajemen perusahaan.

Kinerja perusahaan yang dihitung dengan rasio keuangan, tidak akan dapat dipisahkan dari ukuran perusahaan yang dicerminkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, memungkinkan kinerja keuangan yang terjadi dalam operasional suatu perusahaan semakin besar pula. Keuntungan, kerugian dan biaya yang dapat ditekan mungkin saja berbeda dengan perusahaan dengan aset yang lebih kecil, sehingga *Corporate Governance* dapat diketahui di suatu perusahaan tersebut.

Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang berlandaskan peraturan undang-undang dan norma yang berlaku. Laba merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Baik kreditur ataupun investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan earning power, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah mengisyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mengisyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik terbaik penerapan manajemen resiko dan komite audit serta melalui Indonesia *Society of Independent Commissoners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Metode penelitian kinerja yang digunakan selama ini, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembanding yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu atau dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis. Penilaian ini menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan. NPM dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Salah satu alasan menggunakan laba sebagai alat pengukur kinerja karena laba (NPM) lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja keuangan perusahaan dan tidak terikat dengan harga saham.

Kinerja perusahaan negara atau BUMN selama ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. BUMN dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien, karena boros dalam pemanfaatan sumber daya, sarat dengan korupsi, serta memiliki profitabilitas rendah. Kritik ini cukup beralasan apabila dilihat dari perkembangan kinerja BUMN yang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat pula BUMN yang memiliki kinerja sangat baik. Argumen yang sering digunakan sebagai penjelasan atas belum optimalnya kinerja BUMN adalah tujuan pendirinya yang lebih diprioritaskan pada pemberian pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan perolehan laba.

Kinerja BUMN yang rendah secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, mengingat salah satu perannya adalah sebagai penyedia public goods, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Disamping itu peran BUMN juga menyediakan input seperti listrik, gas bumi, air, minyak dan lainnya untuk kepentingan dunia usaha. BUMN memang telah mampu memainkan peran untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat, tetapi peran tersebut dicapai dengan biaya yang sangat tinggi atau tidak efisien (Kantor Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN / Badan Pengelola BUMN, 1998). Inefsiensi pengelolaan BUMN jika dibiarkan berlangsung maka akan menjadi beban bagi masyarakat, karena harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN.

Privatisasi adalah kebijakan yang paling populer dibandingkan dua alternatif kebijakan lain yang dipromosikan pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN, yaitu restrukturisasi dan profitasisasi. Kebijakan tersebut sampai saat ini

masih sering menjadi kontradiksi, di mana terdapat pihak-pihak yang bersifat pro maupun kontra. Pihak yang pro memandang privatisasi sebagai suatu solusi bagi pemerintah untuk mengatasi defisit APBN dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja BUMN secara bertahap. Sedangkan pihak yang kontra memandang privatisasi sebagai upaya untuk menggadaikan "nasionalisme" khususnya untuk privatisasi BUMN yang sebagian sahamnya dijual kepada pihak asing dalam proporsi yang cukup signifikan. Contoh yang paling nyata dan beberapa waktu lalu banyak mengundang polemik adalah privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

Privatisasi mempunyai pengertian yang luas. Beberapa definisi privatisasi dikemukakan antara lain oleh Savas (1987): "*Privatization is the act of reducing the role goverment, or increasing the role of private sector, in activity or in the ownership of asets*." Berdasarkan definisi tersebut, setiap kebijakan yang mengurangi peran pemerintah dan memberikan kesempatan pada peran swasta adalah merupakan kebijakan privatisasi. Dengan menggunakan definisi Savas, kebijakan deregulasi dapat dianggap sebagai tindakan privatisasi, karena deregulasi juga bertujuan mengurangi peranan pemerintah dan memperkuat eksistensi pasar.

Privatisasi adalah salah satu cara efektif memperbaiki kinerja BUMN dari faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut, sehingga banyak perusahaan terutama BUMN melakukan privatisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Keduanya menyatakan privatisasi menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Di berbagai negara, dorongan terhadap pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama stakeholder dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000 dan Cowan, 1990). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan stakeholder untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Jafri Nurhamsyah Said, (2007). Analisis pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan BUMN (Studi kasus privatisasi BUMN dengan metode placement, employee and management buy out dan spin off). Independen: Privatisasi dan dependen: kinerja keuangan. Bahwa privatisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN.

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013)?, 2) Apakah direktur independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013)?, 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013)?, 4) Apakah privatisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (studi pada

BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013)?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013), 2) Untuk menguji pengaruh direktur independen terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013), 3) Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013), 4) Untuk menguji pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan (studi pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009 - 2013).

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Mehran (1994) mengemukakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja badan usaha (terutama terhadap ROA dan Tobins'Q). There *is a growing body of evidence that outside directors are more independent of top management and thus better represent the interest of shareholders than do inside directors*. Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer. Rosenstein dan Wyatt (1990) dalam Mehran (1994) menyatakan bahwa penunjukkan komisaris independen berpengaruh terhadap harga saham secara rata-rata. Dengan kata lain akan meningkatkan nilai PER (*Price per Earning Ratio*). Kenaikan harga saham tersebut mengindikasikan kepercayaan investor terhadap komisaris independen, yang dianggap lebih tidak memihak dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil pemegang saham.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen et.al, 1993 dalam Sam'ani, 2008). Okky Andriyan (2010) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja keuangan. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam CG, dimana keberadaannya menentukan kinerja keuangan.

Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja keuangan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan (Nasution, 2007:24).

H_1: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Direktur Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Terdapat peran penting direktur independen dalam kinerja keuangan. Direktur independen yang efektif akan menentukan kinerja keuangan. Karakteristik direktur independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki ukuran direktur yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direktur yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit. Dalton et. al. (dalam Wardhani, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Purwani (2010) menunjukan pengaruh positif direktur independen terhadap kinerja keuangan, semakin tinggi direktur independen maka semakin besar kinerja keuangan.

H_2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Davidson, Wang dan Xu (2004) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Auditor eksternal dianggap lebih independen dibandingkan dengan auditor internal. Oleh karena itu, auditor eksternal mempunyai peran yang penting dalam kerangka corporate governance. Salah satu fungsi utama auditor eksternal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*complienece*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang (Arifin, 2005). Secara prinsip auditor eksternal harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usulan komite audit.

Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Metriadi Setyawan dan I gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2013) menunjukan pengaruh positif komite audit terhadap kinerja keuangan, semakin tinggi komite audit maka semakin besar kinerja keuangan.

Dengan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H_3: Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan

Galiani et. al, (2003) menguji perbaikan indikator kinerja setelah privatisasi pada 21 perusahaan non

financial dan seluruh bank yang diprivatisasi di Argentina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan non finansial meningkat 188 persen setelah privatisasi. Dengan semakin pentingnya privatisasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, sebagian besar studi empiris privatisasi ini menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan segera meningkat setelah privatisasi (Harper, 2002).

Pada konteks Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai privatisasi BUMN, antara lain : Adam (2008) menguji implikasi kebijakan privatisasi terhadap kinerja PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia diukur dengan menggunakan data keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kinerja PT Telkom pasca privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT Telkom pasca privatisasi mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja PT Telkom pasca privatisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan restrukturisasi pada BUMN. Privatisasi pada PT Tambang Batu Bara misalnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Sasaran dari privatisasi adalah mendapatkan dana dan meningkatkan efisiensi.

Penelitian yang dilakukan Jafri Nurhamsyah Said (2007) memperlihatkan hasil bahwa privatisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dinyatakan semakin rendah privatisasi maka semakin rendah pula kinerja keuangan.

H_4: Privatisasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *korelasional*, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai pengaruh antara variable independent dengan variable dependent. Penelitian ini dilaksanakan di BUMN.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMN yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2009-2013 terdapat 10 yaitu sebanyak 10 perusahaan. Pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer, adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.
b. Data sekunder, adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi dikarenakan data berupa data sekunder. Metode pengambilan sampel digunakan metode data pooling. Data pooling adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Data runtut waktu yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu berupa periode pengamatan yang runtut dari 2 tahun sebelum privatisasi hingga 4 tahun setelah privatisasi.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk

mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Eko 2010: 37).

Dalam penelitian ini diketahui jumlah responden (n) variable komisaris (X1) sebanyak 50, nilai minimum adalah 0,25, nilai maximum adalah 0,60 dan nilai rata-rata (mean) adalah 0,39. Direktur Independen (X2) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 50, nilai minimum adalah 2,00, nilai maximum adalah 11,00 dan nilai rata-rata (mean) adalah 4,70. Komite Audit (X3) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 50, nilai minimum adalah 0,00, nilai maximum adalah 1,96 dan nilai rata-rata (mean) adalah 0,73. Privatisasi (X4) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 50, nilai minimum adalah 1,00, nilai maximum adalah 908,00 dan nilai rata-rata (mean) adalah 2,22. (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 50, nilai minimum adalah 0,10, nilai maximum adalah 62,16 dan nilai rata-rata (mean) adalah 17,36.

Uji Normalitas

Tabel 1
Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Predicted Value
N		50
Normal Parameters[a]	Mean	2.3288636
	Std. Deviation	2.65623793
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.735
Asymp. Sig. (2-tailed)		.652

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data olahan 2015

Model regresi berdasarkan uji *normal probability plot* layak digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas. Nilai signifikansi harus di atas 5% untuk menentukan data dengan uji Kolmogorov Smirnov. Pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa variabel NPM, komisaris independen, direktur independen, komite audit dan privatisasi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,652.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Perhitungan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.964	1.037
X2	.958	1.044
X3	.922	1.084
X4	.918	1.089

Sumber: data olahan

Diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,10. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1
Grafik *Scatterplot*

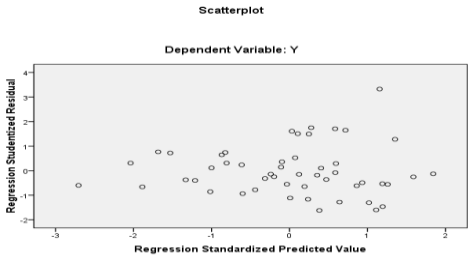

Data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y namun membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan apakah dalam model regresi terjadi gejala heterokedastisitas. Metode yang lebih handal adalah dengan menggunakan uji korelasi antara variabel bebas dengan *Unstandardized*. Apabila nilai *Probability* antara variabel bebas dengan *Unstandardized*>0,05 berarti tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Pengujian Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.988

Sumber: data olahan

Hasil hitung Durbin – Watson sebesar 1,988 sedangkan tabel DW untuk k = 4 dan n = 50 besarnya DW: tabel dL (batas luar) = 0,7523, dU (batas dalam) = 3.1562, 4 – dU = 0.8438 dan 4 – dL = 3.2477 maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW – test terletak pada daerah uji yaitu antara nilai dU dengan 4 – dU. Durbin Watson berada di daerah *no autocorrelation*, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi (*no autocorrelation*) dan tidak terdapat kesalahan data pada periode lalu yang mempengaruhi kesalahan data pada periode sekarang

Hasil Regresi Berganda

Tabel 4
Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Koefisien
1	Konstanta	16,272
2	Komisaris Independen	-0,040
3	Direktur Independen	0,012
4	Komite Audit	0,136
5	Privatisasi	-0,173

Sumber : Data primer diolah (Lampiran dari tabel *Coefficients*

$Y = 16,272 – 0,040\ X_1 + 0,012\ X_2 + 0,136\ X_3 – 0,173\ X_4 + e$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Nilai a = 16,272 merupakan nilai kinerja keuangan apabila X1,X2,X3,dan X4 bernilai nol atau tidak maka kinerja keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 16,272 satuan.
b. Apabila setiap peningkatan komisaris independen (X1) satu satuan maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 0,040 per tahun.
c. Apabila direktur independen (X_2) bertambah satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,012.
d. Apabila komite audit (X_3) bertambah satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,136.
e. Apabila privatisasi (X_4) berkurang satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,173 per tahun.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi atau R^2 merupakan kemampuan prediksi dari

keempat variabel independen Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit dan Privatisasi terhadap variabel dependen NPM. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted* R *Square*) sebesar 0,571 atau 57,1% hal ini berarti 57,1% variasi NPM yang bisa dijelaskan oleh empat variabel bebas yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit dan Privatisasi sedangkan sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM) yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 5,085 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (5,085) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara variabel Komisaris Independen terhadap variable NPM.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Goodstein & Boeker (1991), Kusumawati dan Riyanto (2005), Sylvia dan Sindharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk penegakan *Good Coorporate Governance (GCC)* di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegas dari hasil survey *Asian Development Bank* dalam Boediono Gideon (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Keberadaan komisaris independen ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dijalankan komisaris. Padahal menurut aturan Bapepam, proposi komisaris independen terhadap total komisaris adalah sebesar 30 persen dan menurut aturan PBI No.14 tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dimana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Berdasarkan fenoma tersebut, diduga menyebabkan komisaris independen dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara teoritis dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mengurangi tindakan opotunis manajemen sehingga jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan akan berhubungan dengan makin tingginya perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen yang pada akhirnya meningkatkan kinerja (Cornett dkk, 2006).

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel direktur independen mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM) yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,099 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 karena nilai signifikansi

lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (3,099) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel Direktur Independen terhadap variabel NPM.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Direktur independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Jandik dan Renni (2005), Putri (2006) juga menyatakan bahwa pengangkatan direktur independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk penegakan *Good Coorporate Governance (GCC)* di dalam perusahaan.

Berdasarkan fenoma tersebut, diduga menyebabkan direktur independen dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara teoritis direktur independen yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mengurangi tindakan opotunis manajemen sehingga jika direktur independen dari luar meningkatkan tindakan pengawasan akan berhubungan dengan makin tingginya perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen yang pada akhirnya meningkatkan kinerja (Cornett dkk, 2006).

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (NPM). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,292 dengan nilai signifikansi sebesar 0,204 karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% dan nilai t hitung (1,292) lebih kecil dari t tabel (2,021) maka hipotesis ditolak sehingga mengindikasikan tidak adanya pengaruh antara variabel Komite Audit terhadap variabel NPM.

Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM) adalah diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nuryanah (2004) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM), akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2005), Xie, Devidson, Dadalt (2003) dan Wilopo (2005) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite audit efektif dalam mengurangi perilaku difungsional yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *good coorperate governance* mampu mengurangi tindakan manipulasi laba oleh manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *corporate governance*, transparasi, *fairness,* tanggung jawab dan akuntabilitas (NCCG, 2006) yang prosesnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil Uji Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel privatisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (NPM). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4,850 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (4,850) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel Privatisasi terhadap variabel NPM.

Dengan demikian hipotesis ketiga (H4) yang menyatakan bahwa privatisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM) adalah diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Adam (2074) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa privatisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (NPM).

Hasil penelitian ini menujukan bahwa privatisasi efektif dalam mengurangi perilaku difungsional yang dilakukan oleh pihak manajemen. privatisasi yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa privatisasi yang ada di perusahaan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *privatisasi* yang prosesnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan, yaitu:

1. Hasil perhitungan diperoleh nilat t hitung sebesar 5,085 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (5,085) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel komisaris independen terhadap variabel NPM.
2. Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,099 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (3,099) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel Direktur Independen terhadap variabel NPM.
3. Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,292 dengan nilai signifikansi sebesar 0,204 karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% dan nilai t hitung (1,292) lebih kecil dari t tabel (2,021) maka hipotesis ditolak sehingga mengindikasikan tidak adanya pengaruh antara variabel Komite Audit terhadap variabel NPM.
4. Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,850 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (4,850) lebih besar dari t tabel (2,021) maka hipotesis diterima sehingga mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel Privatisasi terhadap variabel NPM.
5. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,571. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen

komisaris independen, direktur independen, komite audit dan privatisasi terhadap variabel dependen kinerja keuangan pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009-2013 adalah sebesar 57,1%. Atau variabel komisaris independen, direktur independen, komite audit dan privatisasi yang digunakan mampu menjelaskan 57,1% variabel kinerja keuangan pada BUMN yang tercatat di BEI Tahun 2009-2013. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Penyusunan sejumlah saran berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, yaitu :

1. Perusahaan atau emiten yang menjadi pengamatan penelitian di JII (Jakarta Islamic Index) relative masih sedikit karena perusahaan yang masuk pada kelompok disaring setiap 6 bulan sekali dan sebaiknya menambah jumlah periode pengamatan ataupun menggunakan obyek penelitian DES (*Daftar Efek Syariah)* yang lebih variatif.
2. Masih ada variabel *corporate governance* yang bisa digunakan untuk mengukur secara komprehensif realitas dari praktik *corporate governance*, oleh karena itu perlu ditambahkan dengan memasukkan antara lain, sistem pengawasan internal, pengelolaan resiko, dan etika bisnis. Pengawasan internal melalui pemeriksaan, konsultasi dan pengelolaan resiko melalui *risk based auditing* dan *governance processes*. Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik perlu disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, pengalaman komisaris independen dan komite audit.
3. Bagi peneliti lain, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi NPM agar hasil yang didapat lebih *reliable* dan dapat digunakan sebagai dasar analisis oleh para pengguna informasi, misalnya kondisi politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, pengalaman manajemen, karakter dan reputasi pemegang saham mayoritas serta tingkat persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia* (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). 13 Oktober 2009.

Aji, Bimo Bayu. 2012. "*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajamen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*", Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Astria, Tia. 2011. "Analisis Pengaruh *Audit Tenure*, Struktur *Corporate Governance*, Dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan", Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. 2011.

Adam H., Davis P., Tomer J., et al. *NIH Stroke Scale Definitions.*

Eko Putro Widoyoko. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Febriyani dan Zulfadin. 2003. *Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisadi Indonesia.*

Galiani, Sebastian, *Paul Gertler, dan Ernesto Schargrodsky*. 2005. *" Water for Life: The Impact of Privatization of Water Services on Child Mortality."* Journal of Political Economy. 113 *: 83 – 120.*

Harper & Row Porter, M., 1992, "*Capital Disadvantage: America" s Failing Capital Investment System*", Harvard Business Review, Vol. 70, pp. 65-82.

Helfert, Erick A. 2000. Teknik Analisis Keuangan: Petunjuk Praktis untuk Mengelola dan Mengukur Kinerja Perusahaan. Dialih Bahasakan oleh Herman Wibowo, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Jafri Nurhamsyah Said, 2007. Analisis pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan BUMN (Studi kasus privatisasi BUMN dengan metode placement, employee and management buy out dan spin off). Fakultas Ekonomi universitas Jember.

Komang Meitradi Setyawan dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, 2013. Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Mehran, H., 1992. .Executives Incentives Plans, Corporate Control, and Capital Structure. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. 21, p 131-144.

Nasution dan Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X.

Okky Andriyan. 2010. Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. *Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.*

Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2007. Tesis S-2 Magister Manajemen.* Semarang : Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro.

Savas. 2000. Privatization and Public Private Partneship, New York: Seven Bridges Press, LLC.

Tri Purwani. 2010. Pengaruh Good Corporate terhadap Kinerja Perusahaan. Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI.

Turley, Stuart dan Mahbub Zaman. 2004. The Corporate Governance Effect of Audit Committees. Journal of Management and Governance: 305-332.